

## ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN DANA APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 2003 -2011

Leo Hendra Permana, Evy Yulia Purwanti<sup>1</sup>

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*Deconcentration a grant from central government to the regions to help increase local government programs are still a central concern: education, health, infrastructure, and others. Deconcentration fund is part of central government expenditure, which consists deconcentration of personnel expenditure, spending on goods, and social assistance.*

*This study aims to analyze the allocation of deconcentration and demonstrate empirically difference deconcentration funds and funds from the budget of the school dropout rate in the province of Central Java. Study of this research uses quantitative data, the type of time series data. Time series data are used from the period 2003-2011. Analysis tools used are different test, to see the difference in the concentration funds and the absence of deconcentration funds with funds from the budget for education and educational development from year to year.*

*Results of the study showed that the concentration funds allocated to primary education, secondary education, early childhood education. The largest allocations to basic education about 90%, different test results indicate that the presence or absence of deconcentration deconcentration has no difference with funds from the province expenditure of the school dropout rate in the province of Central Java.*

*Keywords: Deconcentration, Province expenditure, Dropouts education, Central java*

### PENDAHULUAN

UUD 1945 merupakan landasan pemerintah dalam mengatur kegiatan pemerintah dan untuk pengambilan keputusan kebijakan. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa ini yaitu sistem desentralistik. Sistem desentralistik adalah mengacu pada pelimpahan kewenangan ke daerah namun hanya beberapa bidang saja yang diserahkan kepada daerah dan diatur melalui Undang-Undang. Setelah runtuhnya orde baru muncul gagasan untuk mengubah pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Sistem ini mengacu pada pelimpahan kewenangan ke daerah namun hanya beberapa bidang saja yang diserahkan kepada daerah dan diatur melalui Undang-Undang.

Urusan utama pemerintahan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat telah dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah (otonomi daerah). Sementara pemerintah pusat hanya melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan yang bersifat mutlak, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, serta beberapa urusan yang tidak diserahkan kepada daerah. Pemerintah Pusat meyakini secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam hal perencanaan dan mengambil keputusan tentang pertanggungjawaban publik yang tercantum pada Undang-Undang 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan system pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang

---

<sup>1</sup> Penulis penanggung jawab

selalu berubah. Pada kenyataannya Pemerintah Daerah tidak dapat mengelola sendiri bidang-bidang tersebut terutama pada bidang pendidikan. Pembinaan bidang pendidikan memang perlu biaya yang cukup tinggi apalagi pada tingkat Provinsi, yang memiliki beberapa kota/kabupaten dengan pendapatan daerah berbeda-beda. Sehingga masih memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk membantu dalam dana pendidikan di setiap daerah yang masih kurang dalam menangani bidang pendidikan.

Tujuan pemerintah pusat tentang sekolah wajib 9 tahun tersebut memang sangat perlu untuk memberi pengarahannya kepada masyarakat bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pendidikan walaupun pemerintah daerah sudah diberi kewenangan Otonomi Daerah. Namun pemerintah pusat tetap membantu dengan dana APBN yang dikeluarkan untuk membantu bidang-bidang publik yang sekiranya pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengembangan dengan dana APBD. Dana yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut antara lain dana dekonsentrasi terutama dibidang pendidikan.

Dana dekonsentrasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun semua kegiatan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat kewenangan pengaturan dan pengelolaan semuanya dilimpahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sepenuhnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang menangani tentang bidang pendidikan. Namun untuk semua kegiatan tentang pelaporan dana dekonsentrasi tetap dilaporkan pemerintah pusat untuk mengetahui perkembangan apa yang sudah terjadi pada daerah.

Pada Provinsi Jawa Tengah dana dekonsentrasi dikelola dan disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah semua kegiatan, penyaluran dan laporan semua dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dana dekonsentrasi pendidikan di provinsi Jawa Tengah untuk membantu non fisik (beasiswa siswa kurang mampu, pelatihan pendidik) selain membantu non fisik alokasi dana dekonsentrasi apakah tersalur dengan lancar dan untuk kegiatan apa saja sebab tidak diketahui alokasi dana dekonsentrasi untuk apa saja dan ada perbedaan atau tidak dengan sebelum adanya dana dekonsentrasi dengan sesudah adanya dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi untuk membantu perkembangan mutu pada pendidikan di Jawa Tengah. Semua kegiatan dana dekonsentrasi dapat dilihat pada Tabel 1 Jumlah Total Dana Dekonsentrasi.

Dalam tabel dapat dilihat semua program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu pada pendidikan. Dalam tabel dapat dilihat saluran dana dekonsentrasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Pendidikan Dasar; 2. Pendidikan Menengah; 3. Pendidikan Usia Dini, setelah pembagian tersebut baru ada program ditentukan untuk meningkatkan mutu pada masing-masing tingkat pendidikan tersebut.

**Tabel 1**  
**Alokasi Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011**

No	Program	Tahun								
		2007	2008	Growth	2009	Growth	2010	Growth	2011	Growth
A	Pendidikan Dasar	1.570.200.009.000	2.234.906.939.000	42%	2.198.043.867.000	-2%	2.056.254.853.000	-6%	1.127.190.370.000	-45%
	beasiswa operasional sekolah	1.367.547.813.000	1.327.724.117.000	-3%	2.023.876.774.000	52%	2.000.188.214.000	-1%	1.058.570.667.000	-47%
	perluasan dan peningkatan mutu SMP	86.597.507.000	32.626.788.000	-62%	21.108.180.000	-35%	19.441.832.000	-8%	52.036.155.000	168%
	perluasan dan peningkatan mutu SD	104.395.800.000	119.614.438.000	15%	19.089.637.000	-84%	1.718.359.000	-91%	512.820.000	-70%
	pembangunan SD-SMP satu atap	-	13.600.000.000	-	9.904.823.000	-27%	-	-	-	-
	penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP	-	39.936.960.000	-	58.622.400.000	47%	21.132.100.000	-64%	4.127.000.000	-80%
B	Pendidikan Menengah	113.810.397.000	39.261.894.000	-66%	225.053.556.000	473%	181.397.342.000	-19%	388.448.348.000	114%
	Perluasan Mutu SMA	53.127.359.000	30.681.528.000	-42%	33.128.482.000	8%	21.848.055.000	-34%	19.490.969.000	-11%
	Perencanaan peningkatan mutu dan evaluasi SMK	60.683.038.000	1.212.528.000	-98%	10.645.688.000	778%	1.243.440.000	-88%	7.940.064.000	539%
	beasiswa untuk siswa miskin jenjang dikmen	-	84.078.540.000	-	67.861.140.000	-19%	62.907.780.000	-7%	76.406.995.000	21%
	rehab. Ruang kelas jenjang pendidikan menengah	-	1.012.500.000	-	1.750.000.000	73%	-	-	-	-
	bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMA	-	3.750.000.000	-	24.652.710.000	557%	33.279.660.000	35%	37.858.865.000	14%
	bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMK	-	35.534.741.000	-	62.845.635.000	77%	62.118.407.000	-1%	28.655.130.000	-54%
C	Pendidikan Usia Dini	14.824.772.000	8.513.939.000	-43%	577.197.000	-93%	257.925.000	-55%	141.308.714	-45%

Tabel 1 menunjukkan pembagian dana dekonsentrasi diantara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini serta program-program yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi untuk Provinsi Jawa Tengah memang tidak selalu menanjak. Pada tahun 2007-2011 memang ada kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pemberian bantuan tersebut. Pada tahun 2007 Dana dekonsentrasi yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.570.200.009.000,- untuk semua kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, pada tahun 2008 terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 42% ( Rp. 2.234.906.939.000,-) dari dana yang didapatkan pada tahun 2007. Tahun 2009 terjadi penurunan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 2.198.043.867.000,- (2%) dari tahun 2008, penurunan tersebut dapat terlihat ada perubahan pada program yang dilaksanakan pada tahun 2009 memang adanya penurunan yang cukup pada program perluasan mutu SD. Dengan adanya penurunan dana dekonsentrasi pada tahun 2009 tidak merubah semua program yang dilaksanakan memang ada pengurangan pada peningkatan mutu SD namun pemerintah melihat bahwa lebih penting dialokasikan ke dalam dana BOS (Beasiswa Operasional Sekolah). Pada tahun 2010-2011 selalu terjadi penurunan terus menerus terhadap dana dekonsentrasi Jawa Tengah yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan program yang telah direncanakan dengan lancar walaupun ada penurunan dana dekonsentrasi. Program yang dilaksanakan pada Tabel 1 tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keadaan yang perlu dikembangkan pada tahun tersebut menurut daerah-daerah yang membutuhkannya.

Pemerintah sudah berusaha memperbaiki mutu pendidikan melalui dana dekonsentrasi pada provinsi Jawa Tengah, namun angka putus sekolah masih tinggi dengan rata-rata 5000 hingga 2000 anak putus sekolah. Dapat dilihat pada Tabel 2 walaupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan untuk semua kegiatan pendidikan, tetap saja tiap tahun masih muncul angka putus sekolah yang cukup tinggi.

**Tabel 2**  
**Jumlah Siswa Segala Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011**

Pendidikan	Jumlah Siswa									
	2007	2008	Growth	2009	Growth	2010	Growth	2011	Growth	
SD	3.024.252	3.110.358	3%	3.297.612	6%	3.250.196	-1%	3.287.127	1%	
SMP	1.175.991	1.186.213	1%	1.233.311	4%	1.236.413	0%	1.263.311	2%	
SMA	387.268	388.485	0%	389.602	0%	393.246	1%	381.158	-3%	

**Tabel 3**  
**Angka Putus Sekolah Segala Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011**

No	Pendidikan	2007	2008	Growth	2009	Growth	2010	Growth	2011	Growth
1	SD	7.603	7.506	-1%	7.446	-1%	4.658	-37%	5.142	10%
2	SMP	10.214	8.907	-13%	7.944	-11%	6.946	-13%	5.621	-19%
3	SMA	3.260	2.744	-16%	2.321	-15%	2.054	-12%	2.025	-1%

Tabel 2 dan Tabel 3 menggambarkan bahwa masih banyak terdapat angka putus sekolah. Pada tahun 2007 terdapat anak putus sekolah sebesar 7.603 anak dan jumlah siswa 3.024.252 anak pada tingkat SD, pada tingkat SMP 10.214 anak dan jumlah siswa 1.175.991 anak, pada tingkat SMA 3.260 anak dan jumlah siswa 387.158 anak. Dengan melihat tabel tersebut memang sudah ada perkembangan dengan adanya penurunan angka putus sekolah tiap tahun, walaupun dengan skala yang tidak begitu besar. Pada tahun 2008 terjadi penurunan angka putus sekolah, pada tingkat SD 7.506 anak (1%), pada tingkat SMP 8.907 anak (13%), pada tingkat SMA 2.744 (16%), dari jumlah siswa pada tingkat SD 3.110.358 anak, pada tingkat SMP 1.186.213 anak, dan pada tingkat SMA 388.485 anak. Penurunan tersebut juga selalu terjadi pada tiap tahun yang cukup menggembirakan, sehingga bantuan tersebut berjalan sesuai rencana apa yang diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu melalui dana dekonsentrasi tersebut memang bagus pada bidang pendidikan, memang butuh proses yang cukup lama untuk menuntaskan semua masalah yang ada pada bidang pendidikan. Namun pemerintah daerah terutama Jawa Tengah akan tetap berusaha membantu secara baik untuk meningkatkan mutu dan menuntaskan masalah pendidikan seperti angka putus sekolah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alokasi dana dekonsentrasi terhadap pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011 dan menganalisis pengaruh dana dekonsentrasi dengan angka putus sekolah di Jawa Tengah pada tahun 2007-2011 serta menganalisis perbedaan dengan sebelum adanya dana dekonsentrasi dengan sesudah adanya dana dekonsentrasi.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Teori mengenai pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu Rostow dan Musgrave (Guritno M, 1995) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno, 1993).

Dasar teori pengeluaran pemerintah adalah identitas keseimbangan pendapatan nasional ( $Y=C+I+G+(X-M)$ ) dimana Y menggambarkan pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada persamaan  $C+I+G+(X-M)$  dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan

nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai alat pengelolaan perekonomian negara. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah (Ghozali, 1997).

Dekonsentrasi merupakan transfer kewenangan yang terbatas untuk pengambilan keputusan yang spesifik dan fungsi manajemen dengan cara administratif yang berbeda namun dibawah kewenangan yuridis yang sama dari pemerintah pusat (UNDP 1999). Dekonsentrasi merupakan pengeluaran pemerintah pusat untuk menumbuhkan perekonomian dan bidang-bidang lain, ada yang berpendapat mereka menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Berdasarkan kerangka pemikiran disusun suatu hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  = Tidak ada perbedaan angka putus sekolah sebelum dan sesudah adanya dana dekonsentrasi .

$H_1$  = Ada perbedaan angka putus sekolah sebelum dan sesudah adanya dana dekonsentrasi.

## METODE PENELITIAN

Metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Dalam analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T dependen yang digunakan untuk melihat hubungan antara dana dekonsentrasi dan dana APBD terhadap angka putus sekolah. Dalam metode analisis juga menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis Analisis statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dan untuk melakukan suatu pengujian terhadap hipotesis, maka diperlukannya suatu pengujian asumsi klasik yaitu :

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

### Uji Beda.

Untuk pengujian perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependen. Uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen. Hipotesis dalam uji beda adalah bila kita menyatakan perbedaan sebenarnya pada populasi dengan:

Hipotesis = sebelum adanya dana dekonsentrasi – sesudah adanya dana dekonsentrasi.

Maka hipotesis dapat ditulis:

$H_0$  = tidak ada beda angka putus sekolah antara sebelum dan sesudah adanya dana dekonsentrasi

$H_1$  = ada beda angka putus sekolah antara sebelum dan sesudah adanya dana dekonsentrasi.

Jika probabilitas ( $p$ ) > 0.05  $H_0$  diterima, jika probabilitas ( $p$ ) < 0.05 maka  $H_1$  diterima. Dapat dibuktikan dengan rumus uji T :

$$T = \frac{d}{Sd\_d / \sqrt{n}}$$

Dimana,

Df = n - 1

D = rata-rata deviasi/selisih nilai sesudah dengan sebelum

SD\_d = standar deviasi dari nilai d/selisih sampel 1 dan sampel 2

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

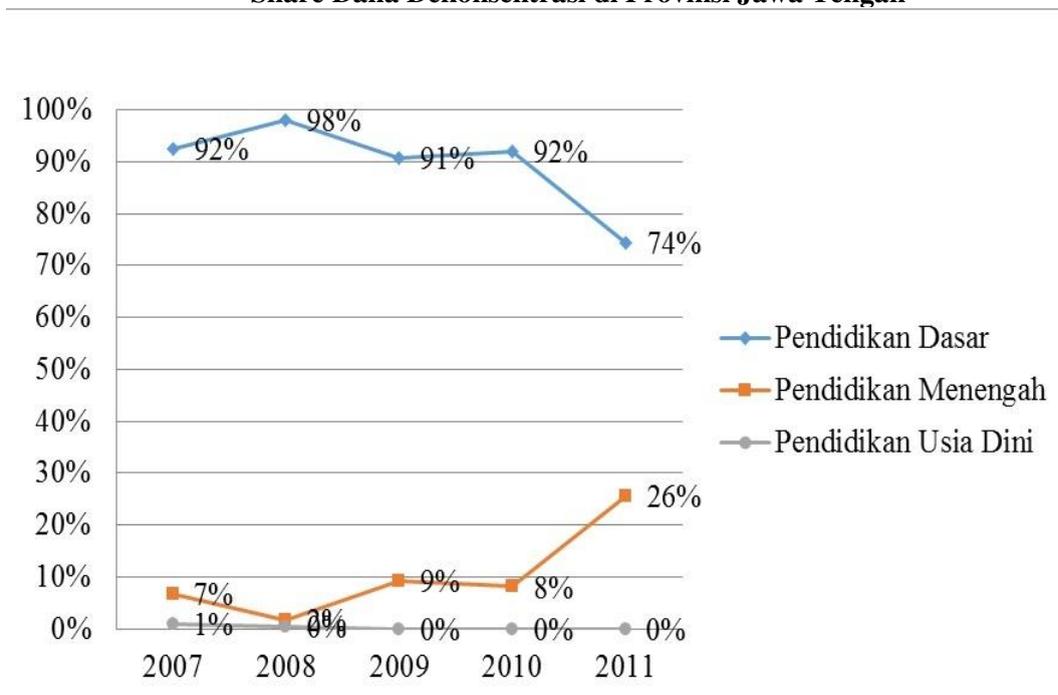
Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder mengenai dana dekonsentrasi, APBD dan angka putus sekolah di Jawa Tengah, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Angka Putus Sekolah (orang)	9	14799	39662	24218,89	7827,094
Dekonsentrasi (rupiah)	5	1656947432	4053666727	2,50E9	1,096E9
APBD (rupiah)	9	88424000	363964000	2,15E8	9,914E7
Valid N (listwise)	5				

Hasil hipotesis penelitian ini untuk melihat hubungan antara dana dekonsentrasi dengan APBD dengan menggunakan uji normalitas, uji corelasi, dan uji T sehingga dapat terlihat adakah pengaruh dana dekonsetrasi dengan dana APBD.

**Diagram 1**  
**Share Dana Dekonsentrasi di Provinsi Jawa Tengah**



Dapat dilihat pada diagram 1 dana dekonsentrasi lebih dari 70% dialokasikan terhadap pendidikan dasar. Terlihat pada diagram 4.4 pada tahun 2007 pendidikan dasar mendapatkan alokasi sebesar 92% yang paling banyak pada tahun 2008 sebesar 98% namun setelah tahun 2008 alokasi dana dekonsentrasi mengalami penurunan hingga 74% pada tahun 2011.

Sebaliknya untuk pendidikan menengah share dana dekonsentrasi pada pendidikan menengah kecenderungan meningkat 7% pada tahun 2007 menjadi 26% pada tahun 2011.

Penurunan pada tahun 2011 pada pendidikan dasar dialihkan ke pendidikan menengah sehingga pendidikan menengah mengalami kenaikan hingga 26%.

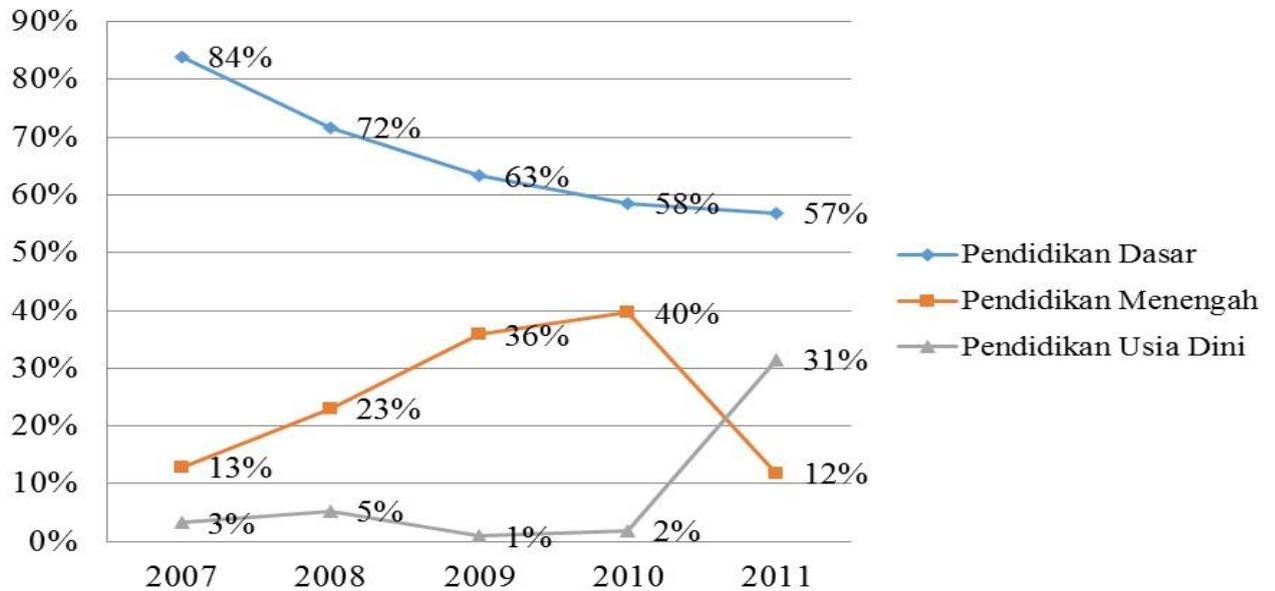
Dana Dekonsentrasi sebenarnya dalam penyusunan laporan tentang hal tersebut dibagi menjadi 3 bagian penting yang mendukung semua kegiatan tersebut,

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bantuan Sosial

Masing-masing bagian tersebut mempunyai peranan penting pada pelaksanaan dana dekonsentrasi pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini belanja pegawai memiliki pengertian yang tidak sama dengan laporan pengeluaran pemerintah disini belanja pegawai diartikan dana untuk peninjauan tentang apa yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana dekonsentrasi. Dalam peninjauan pasti ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh Dinas tersebut, bukan hanya untuk peninjauan saja ada hal yang memerlukan dana seperti halnya penyuluhan terhadap sekolah-sekolah yang mendapatkan dana dekonsentrasi.

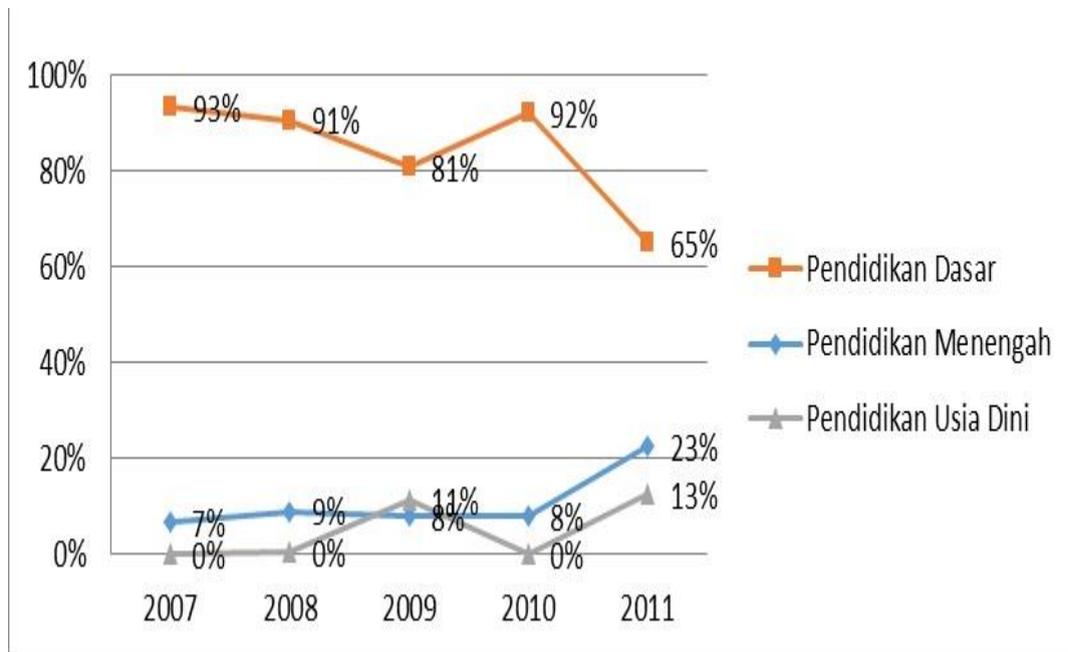
Belanja pegawai hanya muncul pada tahun 2007-2008 tahun 2009-2011 sudah tidak lagi ada pembebanan belanja pegawai terhadap dana dekonsentrasi pemerintah berpikiran bahwa adanya belanja pegawai tersebut dana dekonsentrasi terpotong sedikit untuk semua kegiatan tersebut sehingga belanja pegawai pada tahun 2009-2011 tersebut tidak dibebankan. sehingga dana pada tahun tersebut bisa tersalurkan secara lancar dan mengenai sasaran yang memang tujuan dari pemerintah. sebab belanja pegawai tersebut bisa dialihkan ke aliran dana lainnya entah DAK atau pengeluaran pemerintah lainnya.

**Diagram 2**  
**Share Belanja Barang Dana Dekonsentrasi**



Alokasi belanja barang untuk pendidikan dasar menunjukkan kecenderungan terus menurun, pada tahun 2007 sekitar 84% dari seluruh total belanja barang pendidikan dasar. Pada tahun 2011 menjadi 57%. Sebaliknya untuk pendidikan menengah mengalami kecenderungan naik dari 13% pada tahun 2007 menjadi 40% pada tahun 2010 namun mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 12%, penurunan pada tahun 2011 belanja barang pendidikan menengah disebabkan dialokasikan untuk belanja barang PAUD (Pendidikan Usia Dini) agar pendidikan usia dini juga mendapatkan perlengkapan yang akan diperlukan.

**Diagram 3**  
**Share Tentang Bantuan Sosial**



Pada diagram 3 alokasi bantuan sosial untuk pendidikan dasar menunjukkan kecenderungan terus menurun pada tahun 2007 alokasi bantuan sosial 93% menjadi 81% pada tahun 2009, pada tahun 2010 menunjukkan kenaikan mencapai 92% namun pada tahun 2011 menunjukkan penurunan yang menjadi 65%. Sebaliknya pada pendidikan menengah tiap tahun menunjukkan kecenderungan terus meningkat, pada tahun 2007 alokasi bantuan sosial pendidikan menengah 7% namun terus meningkat menjadi 23% pada tahun 2011. Kecenderungan meningkat ditunjukkan juga pada pendidikan usia dini yang pada tahun 2007 terdapat alokasi bantuan sosial sebesar 0% dapat dibayangkan tidak mendapatkan bantuan sosial namun peningkatan terus terjadi pada tahun 2011 mencapai 13%. Penurunan alokasi bantuan sosial pada pendidikan dasar pada tahun 2011 tersebut, dana bantuan sosial dialihkan kepada pendidikan menengah dan pendidikan usia dini.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Antara Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	476,37515228
Most Extreme Differences	Absolute	,205
	Positive	,205
	Negative	-,176
Kolmogorov-Smirnov Z		,459
Asymp. Sig. (2-tailed)		,984

Dari hasil uji normalitas one-sample Kolmogorov-Smirnov test output tabel 4.5 diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,984. Karena signifikan lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi dengan normal. Dengan uji normalitas ini dapat menunjukkan bahwa data sekunder yang dimiliki berdistribusi normal, sehingga tidak ada masalah dalam data sekunder dana dekonsentrasi.

**Tabel 6**  
**Hasil uji korelasi antara dana APBD dan Dana Dekonsentrasi**

	N	Correlation	Sig.
APBD & SD	9	-,679	,044
APBD & SMP	9	-,749	,020
APBD & SMA	9	-,525	,147
Dekonsentrasi & SD	5	-,057	,928
Dekonsentrasi & SMP	5	-,164	,792
Dekonsentrasi & SMA	5	-,439	,460

Berdasarkan uji korelasi yang dilakukan, terjadi hubungan atau korelasi antara APBD dengan angka putus sekolah tingkat SD,SMP, dan SMA, dalam analisis ini terlihat tingkat korelasi negatif berarti apabila APBD naik dan Dana Dekonsentrasi naik maka angka putus sekolah turun. Antara APBD dengan Dana Dekonsentrasi tersebut APBD lebih mempengaruhi pada tingkat angka putus sekolah SD dengan signifikan 0,044 dan SMP 0,020 sedangkan Dana Dekonsentrasi tidak mempengaruhi pada angka putus sekolah.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Wilcoxon Antara Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD**

	SD - APBD	SMP - APBD	SMA - APBD	SD - Dekonsentrasi	SMP - Dekonsentrasi	SMA - Dekonsentrasi
Z	-2,666 <sup>a</sup>	-2,666 <sup>a</sup>	-2,666 <sup>a</sup>	-2,023 <sup>a</sup>	-2,023 <sup>a</sup>	-2,023 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,008	,008	,008	,043	,043	,043

Hasil uji Wilcoxon antara Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD terlihat hasilnya pada tabel 7. Didalam tabel 7 nilai Z hitung pada hasil uji APBD dan Dana Dekonsentrasi menunjukkan -2,666 dan 2,023 dengan tingkat probabilitas 0,008 dan 0,43. Oleh karena hasil yang terlihat pada uji tersebut nilai probabilitas pada APBD 0,008 berarti dengan hasil tersebut dapat menolak H0 dan menerima H1 dengan alasan probabilitas jauh di bawah 0,05 namun dengan hasil uji dekonsentrasi 0,43 nilai probabilitas jauh diatas 0,05 sehingga bisa disimpulkan ada beda antara sebelum ada dana dekonsentrasi dengan adanya dana dekonsentrasi, maka H1 diterima.

Dalam hasil uji Wilcoxon ini dapat terlihat adanya perbedaan antara alokasi dana APBD dengan Alokasi dana dekonsentrasi terhadap angka putus sekolah, dalam hasil uji Wilcoxon APBD yang lebih efektif dengan penurunan angka putus sekolah daripada dana dekonsentrasi, dengan adanya dana dekonsentrasi atau tidak adanya dana dekonsentrasi pemerintah Jawa Tengah telah dapat mengatasi angka putus sekolah dengan APBD dikarenakan APBD Jawa Tengah sudah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang sekitar 20% dari APBD.

## KESIMPULAN

1. Alokasi dana dekonsentrasi terbesar pada pendidikan dasar melihat dari share alokasi pendidikan dasar mencapai 92% namun mengalami penurunan hingga 74%. Sebaliknya pendidikan dasar mengalami penurunan namun alokasi pendidikan menengah meningkat 26%. Pendidikan usia dini tidak mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi. Alokasi dana dekonsentrasi terbagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan bantuan sosial pada semua tingkat pendidikan ( Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Usia Dini ).
2. Alokasi belanja pegawai digunakan untuk keperluan pendukung, namun belanja pegawai muncul hanya 2 tahun yaitu pada tahun 2007 dan 2008. Alokasi belanja pegawai pada pendidikan dasar dan menengah, alokasi terbesar pada pendidikan dasar pada program perluasan dan peningkatan mutu SD pada tahun 2007, pada tahun 2008 turun. Sebaliknya pada pendidikan menengah pada tahun 2007 alokasi kecil namun pada tahun 2008 terjadi peningkatan alokasi belanja pegawai pada program perluasan mutu SMA. Setelah tahun 2008 tidak ada lagi belanja pegawai untuk segala pendidikan. Semua alokasi dana dekonsentrasi dialihkan ke program yang lebih membutuhkan.
3. Dalam Alokasi Belanja Barang alokasi paling tinggi pada pendidikan dasar yang mencapai 84% pada tahun 2007 namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga mencapai 57%, pada tahun 2011 namun penurunan tersebut disebabkan alokasi dana yang lebih dialokasikan pada pendidikan usia dini yang mencapai peningkatan hingga 31%. Pendidikan menengah mengalami kenaikan juga setelah tahun 2007 mencapai 13% pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga 12% pada tahun 2011.
4. Didalam alokasi dana dekonsentrasi ini tidak hanya belanja pegawai dan belanja barang namun ada alokasi untuk bantuan sosial diperlukan untuk mengatasi bantuan sosial seperti beasiswa operasional sekolah, beasiswa bagi siswa miskin jenjang pendidikan menengah dan banyak program lain. Dilihat dari pendidikan dasar alokasi terbesar bantuan sosial terdapat pendidikan dasar. Pada tahun 2007 alokasi bantuan sosial mencapai 93%, namun mengalami penurunan yang mencapai 65% pada tahun 2011. Sebaliknya pada pendidikan menengah dan pendidikan usia dini mengalami peningkatan pada pendidikan menengah mengalami kenaikan hingga 23% pada tahun 2011, pada pendidikan usia dini juga terjadi kenaikan hingga 13% pada tahun 2011.
5. Hasil uji beda antara dana dekonsentrasi dengan APBD yang menunjukkan ada perbedaan dengan adanya dana dekonsentrasi terhadap angka putus sekolah di Jawa Tengah, dikarenakan dana dekonsentrasi sebenarnya untuk membantu dana APBD yang kurang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah .

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah dalam Angka 2003-2011*. Jawa Tengah.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. *Dana Dekonsentrasi 2007-2011 dan Angka Putus Sekolah 2003-2011 di Jawa Tengah*. Jawa Tengah.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Ghozali, Imam. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah edisi 4*, penerbit. BPFE: Yogyakarta.
- Gunawan, Ary.H. 1986. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Lipse, Richard G. 1990. *Pengantar Makro Ekonomi edisi 8*. Jakarta : Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1997, *Ekonomi Publik*, BPFE : Yogyakarta.
- McEahern, William. 2000. *Macroeconomic, A Contemporary Introduction*. South-Western: Canada.
- Musgrave, Richard A. 1995. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 7 Tahun 2008** Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Keuangan **Nomor 156/PMK 07/2008** Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Keuangan **Nomor 248/PMK 07/2010** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan **Nomor 156/PMK 07/2008** Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Psacharopulos, George dan Harry Anthony Patrinos. 2002. *Return Investment in Education*. America.

SMERU. Juni 2004. Nina Toyamah dan Syaikhu Usman. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. SMERU: Jakarta.

Suparmoko.1994. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi Keempat. BPFE : Yogyakarta.

Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Edisi 9, Jilid 2. Jakarta : PT. Erlangga.

Usmatiadanti, Christiana. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

<http://www.kemenkeu.go.id>

<http://www.wikipedia.com>

<http://www.bpkp.go.id>